

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI
SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BINTAN
(STUDI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN)**

Oleh

**MUHAMMAD FADILLAH
NIM. 190563201039**

ABSTRAK

Pendidikan Anti Korupsi adalah suatu upaya dalam mengurangi dan mengendalikan korupsi dalam upaya untuk memperbaiki pola pikir generasi muda untuk menolak tegas setiap bentuk tindakan korupsi. Dalam upaya mewujudkan impian tersebut Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten/kota yang telah dapat menerapkan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah. Tujuan dari penelitian ini sebagai salah satu bentuk mengetahui seperti apa penerapan atau Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Dasar Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan teori Goerge C Edwards III(dalam Riant Nugroho 2009:636). Ada 4 indikator dalam penelitian ini yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi dengan jumlah informan 6 orang. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Kebijakan tersebut dapat berjalan dengan melihat variabel satu dengan variabel lainnya tanpa membuat perbandingan antara variabel satu sama lain. Hasil dari wawancara, dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan kemudian di lakukan analisa bahwa dapat di simpulkan Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Bintan belum dapat memberikan hasil yang maksimal, hal tersebut bisa terlihat dalam empat Indikator yaitu sumber daya kurangnya pelatihan kepada tenaga pendidik mereka masih belajar secara mandiri walaupun memang ada beberapa sekolah yang melakukan pelatihan secara daring. Namun dalam pelaksanaan secara menyeluruh dapat berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa kendala dalam menjalankan Kebijakan ini salah satunya adalah masih belum meratanya kebijakan ini berjalan untuk saat ini sekolah yang sudah menerapkan ada empat sekolah yang terdiri dari 2 Sekolah Dasar dan 2 Sekolah Menengah. Dengan demikian Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Bintan dinilai belum maksimal dan harus dapat di tingkatkan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Anti Korupsi

**IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION POLICY IN
BINTAN REGENCY BASIC EDUCATION UNIT
(STUDY OF BINTAN DISTRICT EDUCATION DEPARTMENT)**

**By.MUHAMMAD FADILLAH
NIM. 190563201039**

ABSTRACT

Anti-Corruption Education is an effort to reduce and control corruption in an effort to improve the mindset of the younger generation to firmly reject any form of corruption. In an effort to realize this dream, based on the Bintan Regent Regulation Number 20 of 2020 concerning the Implementation of Anti-Corruption Education in Basic Education Units in Bintan Regency. Bintan Regency is one of the regencies/cities that have been able to implement Anti-Corruption Education in Elementary and Middle Schools. The purpose of this research is to find out how the implementation of the Anti-Corruption Education Policy in the Basic Units of Bintan Regency is like. This study uses the theory of George C Edwards III (in Riant Nugroho 2009:636). There are 4 indicators in this study, namely: Communication, Resources, Disposition/Attitude of Executors and Bureaucratic Structure with 6 informants. This study explains how the policy can work by looking at one variable with another without making comparisons between variables. The results of the interviews, documentation and direct field observations were then analyzed so that it could be concluded that the Implementation of the Anti-Corruption Education Policy in the Bintan Regency Basic Education Unit had not been able to provide maximum results, this can be seen in four indicators, namely the lack of training resources for staff their educators are still learning independently even though there are indeed a number of schools that conduct online training. However, the implementation as a whole can run smoothly, although there are several obstacles in implementing this policy, one of which is that this policy is still not evenly distributed, for now there are four schools that have implemented it, consisting of 2 elementary schools and 2 middle schools. Thus the Implementation of Anti-Corruption Education Policy in Bintan Regency is considered not optimal and must be improved.

Keywords: Policy Implementation, Anti-Corruption Education